

KAMPUS KEMBALI MENGGUGAT

Tegakkan Etika dan Konstitusi, Perkuat Demokrasi

YOGYA (KR) - Sivitas akademika UGM bersama sivitas akademika universitas lain di Yogyakarta dan elemen masyarakat sipil menggelar gerakan 'Kampus Menggugat' di Balairung UGM, Selasa (12/3). Gerakan ini untuk mengembalikan etika dan konstitusi yang terkoyak selama lima tahun terakhir.

Prof Wahyudi Kumorotomo dari Fisipol UGM saat pembacaan deklarasi menyerukan, universitas sebagai benteng etika menjadi lembaga ilmiah independen yang memiliki kebebasan akademik penuh untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menyuarakan kebenaran berbasis fakta, nalar dan penelitian ilmiah.

"Sege­nap elemen masyarakat sipil musti terus kritis terhadap jalannya pemerintahan dan tak henti memperjuangkan kepentingan rakyat banyak. Begitu pula dengan ormas sosial keagamaan, pers, NGO, CSO, jangan sampai

terkooptasi, apalagi menjadi kepan­jangan tangan pemerintah," katanya.

Lebih lanjut Prof Wahyudi Kumorotomo mengatakan, gerakan Kampus Menggugat juga menyeru kepada para pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi secara substansial dan menjunjung tinggi amanah konstitusi dalam menjalankan kekuasaan demi mewujudkan cita-cita proklamasi dan janji reformasi. Politik dinasti tak boleh diberi ruang dalam sistem demokrasi.

Gerakan Kampus Menggugat juga menyeru kepada para pemegang kekuasaan untuk menegakkan supremasi hukum dan memberantas segala macam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) tanpa mentolerir pelanggaran hukum, etika dan moral dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Secara serius mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial bagi semua warga dan tak membiarkan negara dibajak oleh para oligarki dan para politisi oportunist yang terus mengeruk keuntungan melalui kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat pada umumnya," katanya.

Sementara itu, Prof Budi Setiadi Daryono dari Fakultas Biologi UGM mengatakan, sebagai akademisi yang memahami hak dan tanggung jawab konstitusional, melalui gerakan Kampus Menggugat ini menetek nurangi sege­nap elemen masyarakat untuk bersinergi membangun kembali etika dan norma yang terkoyak dan mengembalikan marwah konstitusi yang dilanggar.

"Apa yang kita perjuangkan saat ini akan menentukan Indonesia yang akan kita wariskan kepada generasi anak-cucu. Hidup demokrasi, panjang umur Republik," katanya. **(Dev)-d**

Ungkap

Demikian pula, Keistimewaan DIY harus ditegakkan dalam konteks teknokratis, dengan mengintegrasikan program-program pembangunan yang unik dan pemanfaatan teknologi, menciptakan pembangunan yang tidak hanya harmonis, tetapi juga berdampak nyata.

Untuk itulah, momentum hari jadi kali ini, sekaligus menjadi se­bentuk alarm untuk *gumregah*, dengan menyerap esensi perjuangan yang telah diukir Mataram Islam dan Kasultanan Yogyakarta. Keduanya, mencerminkan benteng yang tak tergo­yahkan oleh gelombang kolonialisme, dalam memelihara esensi Indonesia.

Hal ini juga menyiratkan seruan, untuk menghargai sesama manusia, sekaligus mengambatkan kecin­taan, terhadap bumi dan budaya

Jokowi:

Dalam sambutannya Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., menyampaikan, apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH. Mairuf Amin atas dukungannya dalam mendorong gerakan cinta zakat di Indonesia sehingga pengumpulan zakat secara kuantitas dan kualitas tumbuh dengan baik.

"Pada tahun 2023, total pengumpulan ZIS DKSL Nasional tercatat mencapai Rp 32 triliun yang artinya meningkat cukup besar dari tahun

Yogyakarta. Hari jadi, juga menjadi momentum untuk menghormati pengorbanan para pendiri *Ngayogyakarta Hadiningrat*, para pahlawan, dan para pendahulu, yang telah memperjuangkan kemerdekaan, dan merintis eksistensi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Semangat keberanian akan menjadi nyala yang memandu setiap langkah, menuju masa depan Daerah Istimewa Yogyakarta yang adil sejahtera, serta menjadi sumber inspirasi bagi bangsa Indonesia dan dunia. Sehingga untuk mencapai tataran tersebut, menjadi tugas kita bersama, baik jajaran pemerintahan dan sege­nap masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk *manunggal-nyawiji* dalam mewujudkan 'hidup, kehidupan dan penghidupan baru' yang lebih se-

sebelumnya sebesar 43.74 persen," jelas Kiai Noor.

Kiai Noor mengatakan, Gerakan Cinta Zakat juga telah banyak diikuti oleh banyak gubernur serta bupati dan walikota di seluruh Indonesia. Di BAZNAS Pusat sendiri, tercatat pengumpulannya tumbuh sebesar 39.08% pada tahun 2023 terkumpul sebesar Rp 881 Miliar.

Dalam hal penyaluran zakat, Kiai Noor melanjutkan, BAZNAS telah melakukan aktivitas penyaluran zakat sesuai dengan ketentuan dan

jahtera.

"Saya mengajak kita semua untuk *mangayubagya* sekaligus mendoakan kemashlahatan DIY, di hari jadinya yang ke-269 ini. Semogalah kedamaian, keberkahan, dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa menyertai kita semua," katanya.

Di luar stadion, terdapat stan layanan identitas kependudukan digital dan aneka produk UMKM. Termasuk sembako murah yang mendapat sambutan antusias masyarakat. Antreannya mencapai lebih dari 200 meter. Terutama untuk komoditas telur, beras dan minyak goreng. Ada juga layanan cek kesehatan (darah) dan jiwa. Selain itu ada hiburan tarian dan musik tradisional dari Omah Cangkem. **(Awh)-f**

kebutuhan masyarakat. Secara nasional total penyaluran ZIS-DSKL mencapai Rp 31 triliun rupiah dimana nilai ini tumbuh sebesar 43.78 persen secara year-on-year.

"Untuk BAZNAS Pusat sendiri pada tahun 2023 penyaluran zakat mencapai Rp 675 miliar atau tumbuh sebesar 15.48 persen. Penyaluran yang dilakukan BAZNAS pusat berfokus pada kegiatan beasiswa & pendidikan, ekonomi dan bantuan sosial kemanusiaan," pungkasnya. **(Fie)-f**

Petasan

Ledakan petasan bisa juga sampai membakar fragmen tubuh manusia yang berada pada daerah sekeliling ledakannya. Bahkan, dalam beberapa kasus, bermain petasan im­presinya menyebabkan fatalitas.

Sudah bukan rahasia lagi jika pengawasan dan urusan birokrasi kita tak kapabel mencegah pedagang untuk berjualan petasan. Jamaknya aksi-aksi penyelundupan petasan dari luar negeri dan letainya supervisi menjadi biang kerok. Sehingga ujung-ujungnya menjadikan Indonesia lahan ebakar uang bagi oknum-oknum tak bertanggung-jawab.

Ditinjau dari aspek religi, membakar petasan lebih banyak mudaratnya ketimbang dari segi maslahatnya. Wajar jika para ulama melarang membakar petasan. Dari perspektif yuridis pun, regulasi perihal petasan sudah amat asertif teruang di dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12/1951 dan pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur soal

bahan peledak dapat menimbulkan ledakan serta dianggap mengganggu lingkungan. Di dalam pelbagai reglemen *a quo* sudah ditandaskan bahwasanya pembuat, penjual, penyimpanan serta pengangkutan petasan dapat dikenakan hukuman minimal 12 tahun penjara hingga seumur hidup.

Hukum ini harus ditegakkan, tanpa pandang bulu. Bahkan atas kausa tersebut, semestinya di bulan Ramadan, pedagang dan elemen-elemen lain yang inheren dengan petasan hendaknya tahu diri dan menahan nafsu melulu ingin mencari cuan. Seyogianya diinsafi bersama, bulan Ramadan merupakan momen penyucian diri, bukan berfoya-foya, membakar amarah orang lain dengan petasan dan hal-ihwal nan tak berfaedah lainnya.

Khusus para orangtua pastikan buah hati Anda dengan diberi pengertian agar memanfaatkan bulan puasa dengan prudensial. Jika ingin bermain pun bisa menggunakan permainan-permainan lain

seperti bermain peran, congklak, ataupun berjalan menggunakan bambu. Jadi tak ada lagi premis kenapa harus marak petasan kala bulan Ramadan.

Bulan Ramadan ini adalah bulan kesabaran di mana kita diuji untuk dapat mengekang hawa nafsu berse­nang-senang. Maka spirit Ramadan sesungguhnya ialah semangat menghargai orang lain, memper­lakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan.

bulan Ramadan mesti menjadi momentum untuk menjadi pribadi terbaik. Kita patut mengisinya dengan kegiatan-kegiatan kerohanian yang dapat mendekatkan diri kepada-Nya. Pada akhirnya, menjaga kondusivitas Ramadan dengan nyaman dan tenang, serta jauh dari gangguan keamanan termasuk petasan menjadi begitu relevan, sehingga khalayak publik bisa beribadah dengan khushuk.

(Penulis adalah Dosen Prodi Ilmu Hukum FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)-d

GELAR RAT TUTUP BUKU 2023

Koperasi Jasa Utama Menuju Modern



KR-Istimewa

Pengurus dan Anggota Koperasi Jasa Utama usai RAT.

YOGYA (KR) - Koperasi Jasa Utama yang beranggotakan pegawai Bank BPD DIY mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Buku 2023. RAT dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY Ir Srie Nurkyatsiwi MMA, Perwakilan Kantor Akuntan Publik Hadiono dan Rekan, pengawas, pengurus serta anggota.

"Tantangan koperasi semakin ketat dan menantang. Munculnya platform pinjaman online menambah persaingan dalam meluncurkan pinjaman. Koperasi Jasa Utama harus semakin kreatif dalam mengembangkan produk dan layanannya, serta menjaga tata kelola yang baik, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP," kata Srie Nurkyatsiwi.

Ketua Pengurus Koperasi Jasa Utama Arif Wijayanto, Rabu (13/3) menyampaikan, kinerja keuangan dan operasional koperasi menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini ditunjukkan aset yang selalu meningkat, tingkat kesehatan koperasi dengan predikat sehat, dan laporan keuangan yang diaudit KAP menunjukkan opini wajar. Program kerja 2024, koperasi akan melakukan ekspansi usaha, di antaranya menambah outlet toko serta pembiayaan dengan platform digital, sebagai langkah menuju koperasi modern.

Hasil penilaian dengan predikat sehat diserahkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY kepada Ketua Pengurus, serta hasil laporan audit dari KAP kepada Pengawas Koperasi. **(Ria)-f**

Hentikan

Misalnya jika ada ternak yang mati dan menunjukkan gejala antraks harus dikubur sedalam 2-3 meter, kemudian bagian paling atas harus disemen. Bahkan supaya optimal, sebaiknya Pemerintah menyediakan Onsite Mobile Incinerator di wilayah yang ada kasus antraks.

"Jangan main-main dengan kuman penyakit ini. Hindari lalu lintas ternak (keluar-masuk) ke daerah endemik antraks. Saat pemusnahan bangkai ternak yang terinfeksi, petugas harus menggunakan pakaian khusus, tidak boleh ditonton warga," ungkapnya.

Dosen Peternakan UGM itu mengusulkan agar Pemerintah membeli

tanah bekas penguburan hewan yang positif terinfeksi penyakit antraks. Karena berdasarkan studi dan pembuktian terkini di Afrika Selatan, spora yang dihasilkan oleh bakteri *Bacillus anthracis* atau penyebab penyakit antraks pada hewan ternak maupun manusia dapat bertahan hingga 250 tahun.

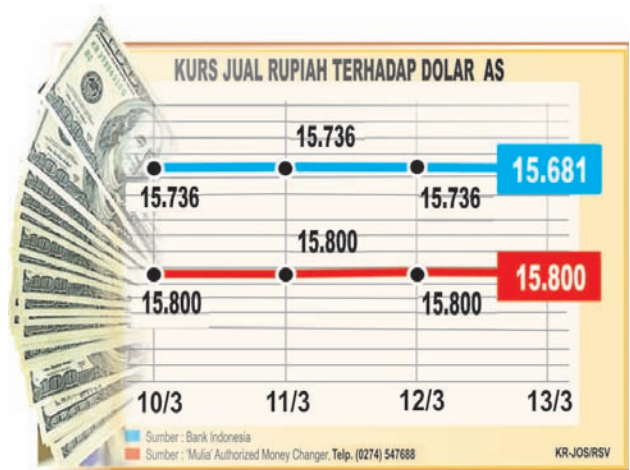
"Berdasarkan studi, spora dari penyakit antraks ini cukup awet. Jadi saya kira tidak ada pilihan, sebaiknya Pemerintah membeli untung tanah yang untuk mengubur ternak, kemudian dibuat pagar tinggi dan diberi informasi bahwa tanah tidak boleh diolah," jelasnya. **(Ria)-f**

Lebaran,

mengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan. "Kendaraan angkutan barang yang dikecualikan dari pembatasan atau tetap bisa beroperasi yaitu yang mengangkut BBM/BBG, hantaran uang, logistik pemilu, hewan dan pakan ternak, pupuk, penanganan bencana alam, serta barang pokok," ujarnya.

Namun kendaraan tersebut harus dilengkapi dengan surat muatan dengan beberapa ketentuan, yakni diterbitkan oleh pemilik barang yang di­angkut, surat muatan yang berisi keterangan jenis barang, tujuan, dan nama serta alamat pemilik barang. Terakhir, ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang.

"Meningkat prediksi tingginya angka mobilitas saat libur lebaran nanti, perlu dilakukan pembatasan angkutan barang agar meningkat-



Prakiraan Cuaca					Kamis, 14 Maret 2024	
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul					22-30	65-95
Sieman					22-29	65-95
Wates					22-29	65-95
Wonosari					22-30	65-95
Yogyakarta					22-30	65-95
Cerah	Berawan	Udara Kabur	Hujan Lokal	Hujan Pelir		

Gratis : Arko

Kecerdasan Buatan dalam Politik: Menuju Transformasi Peran Wakil Rakyat di Indonesia Tahun 2024



TAHUN 2024 menandai awal era yang menarik dalam perkembangan kecerdasan buatan (AI) dengan munculnya AI sebagai alat yang mungkin menggantikan peran wakil rakyat dalam beberapa konteks politik. Artikel ini akan mengeksplorasi mendalam potensi dan tantangan penggunaan generative AI dalam politik Indonesia tahun 2024.

1. Generative AI: Dasar dan Potensi

Generative AI adalah subbidang AI yang bertujuan untuk menciptakan

konten baru, seperti teks, gambar, atau suara, yang seolah-olah dibuat oleh manusia. Teknologi ini dapat menghasilkan pidato, dokumen kebijakan, dan bahkan argumen berdasarkan data dan pola yang telah ada. Inilah beberapa potensi penerapannya dalam politik:

a. Penciptaan Materi Kebijakan

Generative AI dapat menciptakan teks kebijakan dengan cepat berdasarkan data dan input yang telah ada. Ini mempercepat proses perumusan kebijakan dan memungkinkan pembuatan dokumen-dokumen yang lebih lengkap dan informatif.

b. Analisis Data yang Mendalam

Generative AI mampu menganalisis data politik dalam skala besar dan mengidentifikasi tren serta pola yang mungkin sulit untuk dideteksi oleh manusia. Ini dapat membantu dalam mengembangkan kebijakan yang lebih berdasarkan bukti.

c. Diskusi dan Debat Otomatis

Generative AI juga dapat digunakan untuk menghasilkan argumen dan kontra-argumen dalam diskusi politik. Hal ini dapat menciptakan platform di mana kebijakan dapat diuji

dan dibahas secara otomatis.

2. Tantangan dalam Penggantian Peran Wakil Rakyat oleh Generative AI

Meskipun generative AI memiliki potensi besar, ada sejumlah tantangan penting yang harus diatasi:

a. Pertimbangan Etis

Pengambilan keputusan politik seringkali melibatkan pertimbangan etis dan nilai-nilai yang kompleks. Generative AI mungkin tidak dapat memahami nuansa ini sepenuhnya dan menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.

b. Pengawasan dan Akuntabilitas

Dalam sistem demokratis, wakil rakyat terpilih bertanggung jawab kepada pemilih mereka dan dapat diawasi oleh masyarakat. Dalam kasus generative AI, pertanyaannya adalah bagaimana mengawasi dan mengontrol algoritma yang menghasilkan kebijakan. Diperlukan kerangka kerja pengawasan yang ketat.

c. Ketergantungan pada Teknologi

Ketergantungan pada generative AI meningkatkan risiko terhadap gangguan teknis atau serangan siber yang dapat mengganggu proses politik. Keamanan dan ketahanan generative AI menjadi faktor penting.

3. Pendekatan yang Bijaksana

Penggantian peran wakil rakyat oleh generative AI memerlukan pendekatan yang bijaksana. Sebaiknya AI digunakan untuk menginformasikan kebijakan, sementara keputusan akhir tetap di tangan manusia yang memahami konteks sosial, budaya, dan etika yang terlibat. Pengawasan yang ketat dan regulasi yang tepat diperlukan untuk memastikan bahwa generative AI digunakan secara etis dan transparan.

Untuk mewujudkan penggantian peran wakil rakyat oleh generative AI dalam politik pada tahun 2024 atau di masa mendatang, sejumlah persiapan dan langkah-langkah harus dipertimbangkan dengan cermat. Berikut adalah hal-hal yang perlu dipersiapkan.

1. Pengembangan Generative AI yang Cerdas dan Etis

Penelitian dan Pengembangan - Investasi dalam penelitian dan pengembangan AI yang canggih untuk memastikan bahwa teknologi generative AI dapat memenuhi standar yang tinggi.

Etika AI - Menerapkan kerangka kerja etika AI yang ketat untuk memastikan bahwa generative AI tidak menghasilkan kebijakan yang melanggar nilai-nilai

masyarakat atau prinsip-prinsip etika.

2. Kerangka Hukum dan Regulasi

Undang-Undang Khusus - Mengembangkan undang-undang khusus yang mengatur penggunaan generative AI dalam politik dan mengidentifikasi batasan-batasan penggunaannya.

Pengawasan - Membuat badan pengawas atau mekanisme pengawasan yang dapat memantau dan mengaudit penggunaan generative AI dalam politik.

3. Pelatihan dan Pendidikan

Pelatihan SDM - Melatih dan mempersiapkan sumber daya manusia yang dapat memahami, mengawasi, dan mengelola generative AI dengan baik.

Kampanye Pendidikan - Melakukan kampanye pendidikan kepada masyarakat untuk memahami penggunaan generative AI dalam politik dan dampaknya.

4. Konsultasi Publik dan Partisipasi

Diskusi Publik - Mengadakan diskusi publik dan mendengarkan masukan dari masyarakat tentang penggunaan generative AI dalam politik.

Transparansi - Memastikan transparansi dalam pengambilan keputusan yang melibatkan generative AI.

5. Keamanan Teknologi

Keamanan Data - Mengamankan data yang digunakan oleh generative AI dan mencegah potensi ancaman siber.

Penanganan Krisis - Mempersiapkan rencana penanganan untuk menghadapi masalah teknis atau gangguan dalam penggunaan generative AI.

6. Pengujian dan Evaluasi

Berkelanjutan

Pengujian Kinerja - Melakukan pengujian kinerja generative AI secara berkala untuk memastikan keahliannya dalam menghasilkan kebijakan yang baik.

Evaluasi Dampak - Mengevaluasi dampak penggunaan generative AI terhadap proses politik dan masyarakat serta melakukan perbaikan yang diperlukan.

7. Kerja Sama Internasional

Kolaborasi Internasional - Berkolaborasi dengan negara-negara lain dalam pengembangan regulasi dan etika AI.

Standardisasi - Berkontribusi dalam pembentukan standar internasional terkait penggunaan generative AI dalam politik.

Penggantian peran wakil rakyat oleh generative AI dalam politik adalah langkah yang serius dan perlu dipersiapkan dengan matang.

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Creative Economy Park

Mengintegrasikan teknologi ini dalam politik memerlukan perhatian khusus terhadap etika, hukum, pelatihan, dan partisipasi masyarakat. Dengan pendekatan yang bijaksana, Indonesia dapat mencapai potensi penuh penggunaan generative AI dalam politik dengan menjaga nilai-nilai demokrasi dan kepentingan masyarakat. Indonesia tahun 2024 menghadapi peluang untuk memanfaatkan generative AI dalam proses politik. Ini bisa menjadi alat yang kuat untuk mempercepat perumusan kebijakan dan analisis data yang mendalam. Namun, perlu ada keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai demokrasi. Pengawasan dan etika harus tetap menjadi fokus utama agar penggunaan generative AI dalam politik dapat memberikan manfaat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi yang mendasar.